

Analisis Penyebab Kekalahan Petahana Hendri Septa-Hidayat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2024

Nada Luthfiyah¹, Tengku Rika Valentina², Sadri Sadri³

^{1,2,3}Universitas Andalas

*Corresponding author, e-mail: nadalutfiyah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penyebab kekalahan pasangan petahana Hendri Septa-Hidayat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang tahun 2024. Meskipun memiliki rekam jejak administratif yang positif dan didukung oleh sejumlah penghargaan, pasangan petahana hanya meraih 27,75% suara dan kalah dari pasangan Fadly Amran-Maigus Nasir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teori utama yang digunakan adalah Teori Kerugian Petahana dari Barbara Sinclair. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk petahana, tim kampanye, partai politik pengusung, dan masyarakat pemilih di Kecamatan Nanggalo sebagai fokus studi. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kekalahan petahana disebabkan oleh lima faktor utama yang selaras dengan kerangka Sinclair: (1) Kejenuhan publik terhadap kepemimpinan petahana yang dianggap statis; (2) Akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan tertentu, seperti relokasi pedagang Pasar Raya dan tingginya angka pengangguran; (3) Melemahnya komunikasi politik dan narasi kepemimpinan, di mana capaian kinerja gagal dikomunikasikan secara efektif kepada publik; (4) Dinamika perbandingan figur yang tidak menguntungkan, dimana penantang dinilai lebih dekat, aktif, dan membawa narasi perubahan; serta (5) Akumulasi kerugian simbolik dan hilangnya legitimasi politik, di mana petahana kehilangan makna dan kedekatan emosional dengan pemilih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam konteks politik elektoral lokal, kinerja administratif saja tidak cukup untuk memenangkan dukungan tanpa diiringi oleh kemampuan membangun narasi politik yang kuat, menjaga kedekatan emosional dengan pemilih, dan merespons dinamika ketidakpuasan publik.

Kata Kunci: Kejenuhan; Kekalahan; Legitimasi; Petahana; Pilkada.

Abstract

This research analyzes the causes of the defeat of the incumbent pair, Hendri Septa-Hidayat, in the 2024 Padang City Regional Head Election (Pilkada). Despite having a positive administrative track record and being supported by several awards, the incumbent pair only garnered 27.75% of the votes and lost to the pair Fadly Amran-Maigus Nasir. This study uses a qualitative approach with a descriptive type. The main theory used is Barbara Sinclair's Theory of Incumbency Disadvantage. Data were collected through in-depth interviews with key informants, including the incumbent, campaign teams, supporting political parties, and voter communities in Nanggalo District as the study locus. The research findings reveal that the incumbent's defeat was caused by five main factors aligned with Sinclair's framework: (1) Public fatigue (Political Fatigue) towards the incumbent's leadership, which was perceived as static; (2) Accumulation of public disappointment towards specific policies, such as the relocation of traders in Pasar Raya and the high unemployment rate; (3) Weakening of political communication and leadership narrative, where performance achievements failed to be communicated effectively to the public; (4) Unfavorable figure comparison dynamics, where the challenger was considered closer, more active, and brought a narrative of change; and (5) Accumulation of symbolic loss and erosion of political legitimacy, where the incumbent lost meaning and emotional closeness with voters. This study

concludes that in the context of local electoral politics, administrative performance alone is insufficient to win support without being accompanied by the ability to build a strong political narrative, maintain emotional closeness with voters, and respond to the dynamics of public dissatisfaction.

Keywords: Defeat; Legitimacy; Incumbent; Regional Election; Saturation.

How to Cite: Luthfiah, N. et al. (2026). Analisis Penyebab Kekalahan Petahana Hendri Septa-Hidayat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2024. *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*, 2(3), 160-187.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©20256 by author.

Pendahuluan

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) telah mewujudkan kesepakatan politik nasional yang penting, berperan sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan setelah diterapkannya otonomi daerah di Indonesia. Indonesia telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini merupakan inovasi yang memiliki makna penting bagi proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.

Perkembangan pelaksanaan pemilihan kepala daerah sejak disahkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan pelaksanaan Pemilukada secara langsung pertama kali pada tanggal 1 Juni 2005. Tahun 2008, terjadi perubahan aturan Pemilukada pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, yang awalnya mengatur pemilihan langsung oleh rakyat, menjadi pemilihan oleh DPRD. Perubahan ini menjadi bagian dari kebijakan yang lebih berfokus pada efisiensi politik dan pengurangan potensi konflik sosial. Namun, perubahan ini mendapatkan kritik dan akhirnya digantikan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengembalikan pemilihan langsung oleh rakyat. Kemudian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 menyempurnakan mekanisme Pemilukada, termasuk memulai rencana Pemilukada serentak. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur Pemilukada serentak secara nasional, menyempurnakan sistem, dan menjawab tantangan-tantangan baru dalam demokrasi lokal.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting bagi kehidupan bernegara Indonesia di era Reformasi. Penyelenggaraan Pemilu

termasuk Pilkada yang merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung. Pada sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, dilaksanakannya Pilkada bertujuan agar Kepala Daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu. Artinya, penyelenggaraan Pilkada untuk memilih Kepala Daerah merupakan mekanisme demokratis agar rakyat dapat menentukan Kepala Daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan pengertian tentang petahana sebagaimana dituangkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa “Petahana adalah gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota yang sedang menjabat”. Sedangkan petahana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Pemegang suatu jabatan politik tertentu (yang sedang atau masih menjabat). Hak mencalonkan diri bagi petahana terletak pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk petahana berhak mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Pernyataan ini menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi petahana untuk kembali mencalonkan diri, selama mereka memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu calon yang cenderung dinilai memiliki kekuatan politik yang lebih dibandingkan dengan calon lain adalah calon petahana. Calon petahana cenderung dinilai memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan suara pemilih karena calon petahana telah dikenal sebelumnya oleh masyarakat. Sehingga calon petahana merasa tidak perlu bekerja keras dalam kegiatan kampanye. Hal ini kemudian cenderung membuat calon petahana lengah dalam mempertahankan basis pemilih. Keberhasilan maupun kegagalan calon petahana bergantung mereka dalam mempertahankan konstituen atau basis pemilih yang telah diperoleh pada periode sebelumnya.

Berbicara mengenai petahana yang kembali bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah, maka banyak terlintas dalam pikiran orang-orang yaitu kemenangan kembali yang diraih oleh petahana. Hal ini disebabkan karena posisi petahana memiliki banyak peluang. Petahana memiliki relasi yang cukup luas, baik dengan masyarakat, birokrasi yang dipimpin, pemuka adat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan lainnya.

Dalam masa kampanye, petahana tidak perlu mengenalkan diri mereka kepada masyarakat, karena sudah dikenal luas oleh masyarakat. Keuntungan yang didapatkan oleh petahana diperoleh pada masa kepemimpinan sebelumnya yang dimanfaatkan sebagai wadah untuk menjaring dan memobilisasi suara yang membantu kemenangan dalam pemilihan berikutnya.

Terdapat penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian ini mengenai kekalahan petahana. Penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan Fathan Hawali Putra Tahun 2023 dengan judul “Faktor-Faktor Kekalahan Petahana Hendrajoni dalam Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020”. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Tika April Lasmi Tahun 2019 dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Kekalahan Pasangan Petahana (Ali Yusuf-Ismed) Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Sawahlunto tahun 2018”. Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Muhammad Ghaly Fairuz Riadi, Koalisi dan Modalitas (Analisis Kekalahan Pradi Supriatna- Afifah Alia Dalam Pilkada Kota Depok 2020)”. Dari beberapa penelitian terdahulu mengkaji mengenai bagaimana kekalahan petahana dalam fokus marketing politiknya dan modal sosial .

Pada kontestasi Pilkada petahana mempunyai keunggulan maju pada Pilkada karena petahana memiliki banyak peluang dalam mendapatkan kemenangan. Akan tetapi petahana pada Pilkada Kota Padang tahun 2024 mengalami kekalahan padahal petahana memiliki *track record* yang baik selama menjabat sebagai Walikota Padang. Oleh sebab itu, peneliti ingin menganalisis penyebab kekalahan petahana sebagai kepala daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Provinsi Sumatera Barat menggelar pemilihan di 20 daerah, yang terdiri dari 1 provinsi, 12 kabupaten, dan 7 kota. Di antara kota-kota tersebut, tujuh di antaranya melaksanakan pemilihan pada tanggal 27 November 2024, yaitu Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, dan Kota Solok. Dari 7 kota yang melaksanakan pemilihan calon Walikota dan wakil Walikota hanya petahana dari Kota Solok yang memenangkan kontestasi tersebut.

Melihat dinamika Pemilihan Kepala Daerah 2024, banyak petahana yang gagal mempertahankan jabatannya, padahal ketika membicarakan petahana yang kembali mencalonkan diri, sering kali muncul anggapan bahwa kemenangan kembali diraih oleh mereka. Posisi petahana memang memiliki sejumlah keunggulan dan peluang yang besar dalam kontestasi ini. Petahana memiliki relasi yang cukup luas, yaitu dengan

masyarakat, birokrasi pemerintahan, pemuka adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan sebagainya. Pada masa kampanye, petahana tidak lagi perlu memperkenalkan diri kepada masyarakat, karena mereka sudah dikenal luas oleh publik. Masa kepemimpinan sebelumnya dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menjaring dan memobilisasi suara yang berkontribusi pada kemenangan petahana dalam pemilihan berikutnya.

Fenomena pada Pilkada tahun 2024 di Sumatera Barat banyaknya petahana yang kalah. Lazimnya petahana memiliki peluang yang besar untuk terpilih kembali, namun hal tersebut tidak berlaku di Sumatera Barat. Kinerja selama masa jabatan yang menjadi salah satu alasan utama mengapa masyarakat memberikan kepercayaan mereka kembali. Adapun 10 kota dan kabupaten petahana yang kalah dalam Pilkada Sumatera Barat tahun 2024 dan pemenang pada Pilkada 2024.

Tabel 1. Petahana Kalah dan Pemenang Pilkada Sumatera Barat Pilkada 2024

No	Daerah	Petahana	Pemenang	Perolehan suara petahana	Perolehan suara pemenang
1	Kota Padang	Hendri Septa-Hidayat	Fadly Amran-Maigus Nasir	27,75%	55,17%
2	Kota Bukittinggi	Erman Safar-Heldo Aura	Ramlan Nurmantias-Ibnu Aziz	39,18%	51,69%
3	Kota Pariaman	Genius Umar-Ridwan	Yota Balad-Mulyadi	35,77%	50,48%
4	Kota Sawahlunto	Deri Asta-Desni Seswinari	Riyanda Putra-Jeffry Hibatullah	20,91%	79,09%
5	Kabupaten Padang Pariaman	Suhartri Bur-Yosdianto	John Kennedy Aziz-Rahmat Hidayat	42,23%	57,77%
6	Kabupaten Lima Puluh Kota	Safaruddin-Darman	Safni-Ahlul	28,2%	34,38%
7	Kabupaten Agam	Andri Warman-Martias Wanto	Benni Warlis-Muhammad Iqbal	22,56%	29,99%

(Analisis Penyebab Kekalahan...)

8	Kabupaten Pesisir Selatan	Rusman Yul Anwar-Nasta Octavian	Hendra Joni-Risnaldi Ibrahim	39,58%	60,42%
9	Kabupaten Pasaman	Sabar-Sukardi	Welly Suhery-Anggit Kurniawan	34,2%	36.08%
10	Kabupaten Pasaman Barat	Hamsuardi-Kusnadi	Yulianto-M.Ihpan	27,76%	32.54%

Sumber: *Website* Pilkada 2024 KPU

Pada Pemilihan Umum Wali Kota Padang 2024, terdapat tiga pasangan calon yang maju. Pasangan nomor urut 1, Fadly Amran-Maigus Nasir, didukung oleh Partai Nasdem, Golkar, PKB, PDI-P, PPP, dan Partai Ummat. Pasangan nomor urut 2, Muhammad Iqbal-Amasrul, diusung oleh Partai PKS dan Partai Demokrat. Sementara itu petahana Hendri Septa-Hidayat, yang berada di nomor urut 3, didukung oleh Partai PAN dan Partai Gerindra.

Tabel 2. Pemilihan Umum Wali Kota Padang 2024

No	Kandidat	Partai Pengusung	Total Suara	Persentase
1	Fadly Amran–Maigus Nasir	Nasdem, Golkar, PKS, PDI-P, PPP, Ummat	176.648	55,17%
2	Muhammad Iqbal–Amasrul	PKS, Demokrat	54.685	17,08%
3	Hendri Septa-Hidayat	PAN dan Gerindra	88.859	27,75%

Sumber: *Website* KPU Kota Padang Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, Sumatera Barat, menetapkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang 2024, nomor urut 1, Fadly Amran dan Maigus Nasir, sebagai pemenang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Padang 2024. Penetapan ini diumumkan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Kota Padang 2024 yang dilaksanakan di Truntum Hotel Padang pada

Jumat, 6 Desember 2024. Fadly Amran dan Maigus Nasir berhasil meraih 176.648 suara, sementara pasangan calon lainnya memperoleh suara sebagai: nomor urut 2, Muhammad Iqbal-Amasrul, dengan 54.685 suara, dan nomor urut 3 Hendri Septa-Hidayat, dengan 88.859 suara.

Pasangan Hendri Septa-Hidayat dinilai memiliki peluang besar pada Pilkada Kota Padang tahun 2024 karena keduanya lebih dulu dalam mendeklarasikan pencalonan dan telah mendapatkan dukungan dari partai PAN dan Gerindra. Selain itu Hendri Septa sebagai petahana sudah dikenal baik oleh masyarakat Kota Padang. Hal ini disampaikan oleh Otong Rosadi selaku Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara menurutnya pasangan ini patut diperhitungkan. *Incumbent* itu menang di awal, karena popularitasnya sebagai walikota di atas rata-rata calon lainnya dan juga menurutnya pencapaian Hendri Septa ketika memimpin Kota Padang tidak perlu diragukan lagi. Otong Rosadi juga menyebut Hendri Septa memiliki modal sosial politik, karena keluarganya politisi berasal dari Kota Padang.

Selama menjabat sebagai Walikota Padang, Hendri Septa mendapat beberapa penghargaan yaitu: (1) Pemerintah Kota Padang meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dengan kategori Perencanaan dan Pencapaian Daerah Tingkat Kota 2021 Terbaik II dari Kementerian Pembangunan Perencanaan Nasional (PPN)/ Bappenas, 4 Mei 2021; (2) Penghargaan implementasi program smart city kategori smart society gerakan menuju smart city dari Kemenkominfo RI; (3) Penghargaan predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 dari Ombudsman RI; (4) Innovative Government Award (IGA Award) 2023 dari Kementrian Dalam Negeri RI; (5) Penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Hendri Septa merupakan calon Wali Kota Padang yang merupakan petahana sementara Hidayat yang pernah menjabat sebagai legislator atau anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Hidayat pernah menjabat sebagai anggota DPRD Sumbar dua pada periode dari 2014-2024. Ia menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra Sumbar DPRD Sumbar, selama menjabat sebagai anggota Komisi IV DPRD Sumbar tahun 2014, Wakil Ketua Badan Legislasi daerah 2014-2017, Ketua Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat 2017-2019, dan ketua Bapemperda 2019-2021. Berkiprah dengan Partai Gerindra, Hidayat pernah menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Sijunjung pada tahun 2011-2012, Wakil Sekretaris DPD Gerindra Sumbar 2012-2017 dan Wakil Ketua DPD Gerindra Sumbar 2018-hingga sekarang. Hidayat juga Kader Gerindra bersertifikat Diklat Hambalang pada 2019.

Dari rekam jejaknya, Hidayat menunjukkan profil sebagai politisi yang memiliki pengalaman luas dalam legislasi dan serta kepemimpinan partai. Perjalanan dari tingkat daerah hingga provinsi serta keterlibatan strategis, yang mencerminkan kapasitasnya dalam mengelola dinamika politik di Sumatera Barat. Sertifikasi Diklat Hambalang juga mengindikasikan kedekatannya dengan struktur kepemimpinan nasional Partai Gerindra, yang dapat menjadi modal politik kuat. Hendri Septa menjabat sebagai Walikota Padang periode 2019-2024 dan kembali mencalonkan diri sebagai petahana pada Pilkada Kota Padang 2024 Hendri Septa mengajukan diri untuk periode kedua dan juga memperoleh surat rekomendasi dari Partai Amanat Nasional (PAN), partai pengusungnya. Statusnya sebagai petahana memperkuat posisi dalam kontestasi pemilihan, mengandalkan rekam jejak pemerintahan selama lima tahun terakhir. Selama Hendri Septa menjadi Walikota Padang (2021-2024), capaian kinerja makro Kota Padang meningkat. Capaian tersebut dihasilkan karena keberhasilan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Padang berkolaborasi dengan swasta dan pihak terkait lainnya yang berkontribusi ke pembangunan ini.

Adapun bentuk dari pencapaian yang diraih oleh Hendri Septa selama menjabat sebagai Walikota Padang:(1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM Kota Padang tahun 2021 adalah 82,90 persen. Pada tahun 2022 naik menjadi 83,29 persen dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi 83,98 persen; (2) Pendidikan, pada tahun 2022 berada pada angka 16,54 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 16,56 persen; (3) Kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kota Padang terjadi peningkatan dari 73,71 persen di tahun 2022 menjadi 74,94 pada tahun 2023; (4) Jumlah penduduk miskin, kemiskinan tahun 2023 di Kota Padang 4,17 persen. Angka tersebut turun dari tahun 2022 yakni 4,26 persen dan 4,94 persen pada tahun 2021; (5) Padang Kota Layak Huni, Tahun 2023 index livability rata-rata Kota Padang 68,28 persen. Nilai indeks ini meningkat dari tahun 2022 yang berada pada angka 68,20 persen; (6) Penataan moda angkutan umum, beroperasinya Trans-Padang yang melayani 6 koridor Kota Padang; (7) Peningkatan kualitas lingkungan hidup/ Padang Bagoro. Program yang dijalankan dengan konsepsi meningkatkan kualitas kebersihan kota seperti Padang Bergoro, pengerukan dan pembersihan Batang Arau. Kesuksesan ini dimuat dalam majalah Tempo; (8) Pembangunan taman tematik, sebanyak 14 taman kota yang telah dibangun di Kota Padang; (9) Capaian kinerja makro, selama tahun 2021-2023 menunjukkan hasil baik, pertumbuhan ekonomi Kota Padang mengalami peningkatan cukup signifikan 3,65 persen di tahun 2021 dan naik menjadi 4,31 persen di tahun 2022 dan naik lagi menjadi 4,54 persen di tahun 2023; (10) Ketersediaan

Rumah Bersubsidi, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dijalankan sejak tahun 2019. Pada tahun 2023 berhasil memfasilitasi penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 6.503 unit rumah; (10) Hendri Septa juga berhasil menyelesaikan pembangunan Pasar Raya Padang fase VII yang dijadwalkan selesai pada penghujung tahun 2024. Berbagai pencapaian lainnya juga diperoleh selama masa jabatannya sebagai Wali Kota Padang.

Walaupun banyak penghargaan yang telah diraih oleh Hendri Septa pada masa kepemimpinannya tetapi kepemimpinan tersebut belum menunjukkan keberhasilan sebab kepemimpinan tersebut ditunjukkan dari adanya banyak penggusuran pelaku usaha dan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang melalui Satpol PP, yang mencerminkan pendekatan yang tidak berpihak kepada ekonomi kerakyatan. Selain itu selama kurang lebih dari 2 tahun memimpin Kota Padang Hendri Septa tidak didampingi oleh Wakil Walikota akibat tarik ulur kepentingan politik antara partai koalisi. Ketiadaan pendamping dalam memimpin kota menunjukkan lemahnya konsolidasi politik dan ketidaksiapan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang solid kepemimpinan di tingkat kota seharusnya bersifat kolektif dan kolaboratif, sehingga keputusan yang diambil secara terarah dan terukur. Namun fakta bahwa Hendri Septa secara sendiri memimpin tanpa kehadiran wakil yang seimbang justru memperlihatkan kecenderungan kepemimpinan yang dipaksakan dan tidak berorientasi pada efektivitas pemerintahan. Ketidakharmonisan dalam kepemimpinan mencerminkan kepada kelemahan manajemen politik yang dimiliki oleh kandidat.

Petahana yang hanya mengandalkan *track record* dan jaringan politik yang sudah terbangun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI), kepala daerah yang masih memerintah (petahana) memiliki peluang yang cukup besar untuk kembali memenangkan Pemilu. Peluang untuk terpilih kembali dalam pelaksanaan Pemilu oleh calon kepala daerah petahana diperoleh melalui keuntungan langsung dan tidak langsung. Keuntungan langsung diperoleh kepala daerah yang masih menjabat adalah dalam popularitas, kepala daerah sudah dikenal oleh masyarakat pemilih. Sedangkan, keuntungan tidak langsung adalah aktivitas dari kepala daerah sebagai calon petahana. Aktivitas seperti penyerahan bantuan, kunjungan ke daerah, mengenalkan diri di acara kemasyarakatan atau perayaan hari besar agama bisa digunakan sebagai media untuk lebih mendekatkan dan mengenalkan diri kepada masyarakat.

Hendri Septa sebagai petahana telah menjalin koalisi antara PAN dan Gerindra. Gerindra memiliki 7 kursi di DPRD Kota Padang, sedangkan PAN memiliki 5 kursi,

sehingga total dukungan memenuhi syarat minimum. Hidayat, wakil Hendri Septa, merupakan anggota DPRD Sumatera Barat selama dua periode, sementara Hendri Septa menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kota Padang. Kolaborasi Hendri Septa dari PAN dan Hidayat dari Partai Gerindra menjadikan dukungan partai politik sebagai salah satu peluang kemenangan calon, terutama apabila partai tersebut memiliki citra positif di mata publik. Pasangan calon yang didukung oleh partai politik yang kuat memiliki keunggulan dalam memperoleh dukungan yang lebih luas, sehingga memperbesar peluang untuk meraih kemenangan dalam Pilkada.

Di sisi lain, pasangan Fadly Amran-Maigus Nasir memiliki keunggulan dukungan dari enam partai politik yaitu Partai Nasdem, PPP, Golkar, PKB, PDI-P, dan Partai Ummat, yang secara keseluruhan memiliki 22 kursi di DPRD Kota Padang. Meski Hendri Septa-Hidayat hanya didukung oleh dua partai politik, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra. Meski demikian, jika merujuk pada Pemilu DPR 2019, PAN dan Gerindra merupakan dua partai politik dengan perolehan suara terbanyak di Provinsi Sumatera Barat, sehingga tetap memiliki pengaruh politik yang signifikan di tingkat daerah. Koalisi kecil membatasi akses ke basis massa yang beragam. Meski Pilkada bersifat lokal dan dari partai politik memiliki pengaruh, dukungan multipartai dimiliki oleh Fadly-Maigus lebih efektif menjangkau segmen pemilih berbeda, misalnya petani, buruh, UMKM, dll.

Ketimpangan koalisi dan dukungan partai yang dimiliki Hendri Septa-Hidayat yang di mana Hendri Septa-Hidayat terdiri dari dua partai sedangkan Fadly Amran-Maigus Nasir terdiri 6 partai. Ketimpangan menciptakan perbedaan yang signifikan dari sumber daya kampanye, jangkauan organisasi dan mobilisasi massa. Banyak koalisi memberikan dampak positif dari segi finansial, penggalangan dana masif untuk aktivitas kampanye, memungkinkan jangkauan lebih luas, legitimasi politik dari lintas ideologi. Petahana hanya yang mengandalkan *track record* dan jaringan politik sudah terbangun. Karena mengandalkan *track record* tersebut petahana berarti petahana menunjukkan indikasi adanya evaluasi yang tidak baik dari kinerja selama menjabat.

Posisi Hendri Septa sebagai petahana menekankan pada kontinuitas yang ternyata tidak resonan dengan aspirasi masyarakat padang yang menginginkan perubahan. Kegagalan dalam melakukan *branding* sebagai sosok pemimpin yang membawa perubahan menjadi kelemahan dasar dalam kampanyenya. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara citra yang dibangun oleh kandidat dengan ekspektasi pemilih, yang ada pada akhirnya berdampak pada melemahnya daya tarik politik di mata publik. Menyinggung soal visi yang ditawarkan oleh Hendri Septa-

Hidayat yang menekankan pada kontinuitas. Hendri Septa-Hidayat mengusung visi “Kota Padang Metropolitan Maju dan Berkelanjutan” dengan penekanan pada kelanjutan program infrastruktur dan tata kelola pemerintahan dari periode sebelumnya. Visi ini mencerminkan komitmen untuk mempertahankan arah pembangunan yang telah dirintis sejak 2021.

Pelaksanaan Pilkada Kota Padang tahun 2024, Hendri Septa yang berpasangan dengan Hidayat dinilai terlalu percaya diri sebagai petahana karena bisa menenangkan kontestasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang. Pasangan ini kurang mengukur sejauh mana masyarakat puas atas kepemimpinannya, karena merujuk pada SBLF Myriset Consultant merilis hasil survei yang menunjukkan kepemimpinan Mahyeldi sebagai Walikota Padang lebih baik daripada Hendri Septa. Dalam survei tersebut Mahyeldi mendapatkan 77,13 persen, sedangkan Hendri Septa hanya mencapai 22,88 persen. Survei ini dilakukan dengan 800 sampel respons pada tanggal 10-13 Juli 2024 dengan Margin of Error (Moe) sebesar 3 persen. Hasil evaluasi terhadap pemerintahan Kota Padang yang dilakukan oleh lembaga survei Spektrum Politika bahwa persentase alasan tidak puas dengan kinerja Hendri Septa sebagai Walikota Padang karena kinerja kurang dengan persentase 30,66 persen, Gaya kepemimpinan 19,77 persen, dan ekonomi masyarakat 10 persen untuk tiga teratas hasil dari evaluasi pemerintah Kota Padang pada saat Hendri Septa menjabat sebagai Wali Kota Padang. Kinerja Hendri Septa yang dinilai buruk oleh sebagian besar masyarakat menjadi tergerusnya kepercayaan publik. Masyarakat yang tidak puas memilih calon baru yang menawarkan perubahan dan solusi.

Pasangan Fadly Amran-Maigus Nassir mengangkat isu kampanye mengenai ekonomi dan melakukan kampanye 10-15 titik sehari. Janji kampanye oposisi terkait ekonomi ini berkaitan dengan permasalahan di Kota Padang 5 tahun terakhir terkait pengangguran cukup tinggi, berdasarkan data BPS Kota Padang tahun 2024 ditemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Padang tahun 2024 adalah 9,88 persen. Angka ini tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Pasaman Barat berada di posisi kedua dengan angka 6,34 persen dan Kabupaten Dharmasraya di posisi ketiga dengan angka 6,02 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) ini membuktikan bahwa ketidaksesuaian Walikota Padang dalam mengurangi angka pengangguran dan menciptakan lapangan kerja pada generasi muda usia produktif, ini menjadi tolak ukur bagi sebuah kegagalan kepemimpinan bagi suatu daerah. Salah satu misi yang ditawarkan oleh Fadly Amran dan Maigus Nassir adalah “Mendorong Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan” dari misi ini sudah menjelaskan

bahwa Fadly Amran-Maigus Nassir membawa isu ekonomi dalam menjawab permasalahan pengangguran sedangkan dari Hendri Septa-Hidayat lebih menekankan pada berkelanjutan.

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa keberadaan petahana dalam kontestasi Pilkada tidak selalu memberikan keuntungan elektoral. Dalam konteks Pilkada Kota Padang 2024, posisi petahana justru menjadi beban politik akibat kejenuhan publik terhadap kepemimpinan sama dan melemahnya dukungan dari partai politik. Meskipun petahana memiliki rekam jejak positif secara administratif dan memperoleh berbagai penghargaan selama masa jabatan, hal tersebut tidak lagi menjadi faktor utama yang memengaruhi pilihan pemilih. Fenomena ini menunjukkan adanya kerugian petahana, di mana kekuasaan yang lama berpotensi menurunkan dukungan elektoral karena masyarakat menginginkan perubahan dan pembaruan kepemimpinan.

Meskipun demikian, berdasarkan sejumlah asumsi penelitian dan pandangan yang diperoleh dari berbagai data yang ada terdapat beberapa hal yang diduga menjadi penyebab kekalahan pasangan petahana Hendri Septa-Hidayat dalam Pilkada Kota Padang 2024. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyebab kekalahan petahana Hendri Septa-Hidayat pada Pilkada Kota Padang tahun 2024 ?.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditemukan maka peneliti melakukan penelitian dengan tujuan mendeskripsikan penyebab kekalahan petahana Hendri Septa-Hidayat pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2024.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu di antaranya sebagai berikut:

Secara Akademis

Penelitian ini secara akademis mampu menjelaskan mengenai penyebab kekalahan petahana Hendri Septa -Hidayat pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang 2024. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi dalam mengkaji politik lokal di Indonesia, terutama mengenai kekalahan petahana dalam pemilu daerah.

Secara Praktis

Penelitian ini menjadi bahan bagi calon kandidat, tim sukses dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah dan bagi petahana Hendri Septa -Hidayat jika ingin mencalonkan kembali pada pemilihan berikutnya.

Metode Penelitian

Sebuah pendekatan penelitian sangat diperlukan untuk mengamati, mengumpulkan informasi dan menyajikan suatu analisis penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengambil metode penelitian. Menurut Moleong, metode penelitian kualitatif merupakan metode yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Tipe Penelitian yang digunakan adalah deskriptif, tipe penelitian deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka hanya sebagai penunjang. Data pada penelitian bisa diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto dokumen pribadi, pengamatan langsung dan lain-lain. Dengan pendekatan kualitatif ini, dari penulis latar belakang, rumusan permasalahannya, hingga kesimpulannya menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah analisis kekalahan petahana Hendri Septa-Hidayat pada pemilihan kepala daerah Kota Padang tahun 2024.

Hasil dan Pembahasan

Kejuhan Publik Terhadap Kepemimpinan Petahana

Konsep ini adalah sebuah kondisi psikologis kolektif di mana pemilih merasa lelah, bosan, apatis, atau jenuh terhadap figur petahana, gaya kepemimpinan, janji-janjinya atau isu-isu yang terus berulang tanpa adanya solusi yang dirasakan. Kejuhan adalah wujud dari kelelahan tersebut. Ini adalah kondisi emosional membuat pemilih tidak lagi reseptif terhadap pesan petahana sekalipun pesannya positif dan secara aktif menginginkan perubahan.

Kejuhan publik terhadap Hendri Septa sebagai petahana muncul sebagai tema yang paling dominan dalam wawancara lapangan. Masyarakat menilai bahwa kepemimpinan Hendri Septa terasa statis dan tidak menghadirkan pembaruan yang

nyata. Fenomena ini bukan sekedar bentuk ketidakpuasan spontan, melainkan hasil akumulasi persepsi selama masa jabatan yang menimbulkan rasa bosan dan kehilangan harapan terhadap figur yang sama. Seorang masyarakat pemilih Kecamatan Nanggalo, menyampaikan bahwa dirinya sudah tidak melihat perubahan selama Hendri Septa menjabat. “Tidak terlihat perubahan oleh Hendri Septa itu, makanya bertukar pilihan ke yang baru”. Temuan dari masyarakat merupakan bukti jelas menunjukkan persepsi publik mengenai stagnasi kinerja petahana, artikulasi yang menyebutkan tidak terlihat perubahan oleh Hendri Septa menunjukkan bahwa evaluasi negatif masyarakat terhadap rekam jejak Hendri Septa selama menjabat. Pernyataan tersebut juga dirasakan oleh Dayat, masyarakat pemilih daerah Kecamatan Nanggalo yang juga mengeluhkan bahwa sosok Hendri Septa jarang turun langsung ke masyarakat.

“Kalo Hendri Septa ini kurang bermasyarakat, cuma pasang baliho saja. Kalau Fadly Amran sering turun ke masyarakat”.

Temuan ini menunjukkan bahwa kekalahan petahana tidak hanya disebabkan oleh evaluasi kinerja yakni rekam jejak, tetapi juga kegagalan strategi kampanye yang fundamental. Petahana dipersepsikan mengandalkan metode yang berjarak melalui baliho, sementara penantang berhasil merebut hati pemilih melalui interaksi langsung dan intensif dengan turun ke masyarakat yang selaras dengan keinginan pemilih akan sosok pemimpin yang lebih merakyat dan responsif. Sementara menurut Edi, salah satu masyarakat pemilih Kecamatan Nanggalo menuturkan. “Kerjanya Hendri Septa ini bagus, tapi sayangnya tidak kerasa saja kerjanya, makanya kami tidak tahu hasil apa yang dia kerjakan”.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam evaluasi pemilih, bekerja saja tidak cukup. Kinerja tersebut harus berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan dikomunikasikan secara efektif agar masyarakat tahu. Petahana gagal dalam kedua hal tersebut yang berkontribusi langsung pada rekam jejak negatifnya. Ketiga kutipan tersebut menunjukkan pola kejenuhan yang bersumber dari ketiadaan pembaruan, pemimpin dianggap tidak lagi hadir secara nyata di tengah masyarakat. Kejenuhan publik tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh aktor politik yang terlibat langsung dalam tim pemenangnya, Muhammad Rayhan selaku pengurus dari DPD PAN Kota Padang, mengakui kinerja pemerintah Hendri Septa yang melampaui target RPJMD, namun kegagalan justru pada aspek komunikasi publik.

“Kalau dilihat dari program unggulnya, banyak yang berhasil tapi publikasinya kurang. Masyarakat kurang tahu detail program yang sudah jalan.

Temuan ini menegaskan bahwa rekam jejak negatif petahana adalah bentuk kelemahan dalam komunikasi politik. Petahana memiliki program yang berhasil, tetapi gagal dalam berproses pemasaran politiknya. Kekalahan terjadi karena publikasi yang minim membuat kinerja substansial petahana tidak terhitung dalam evaluasi pemilih, sehingga yang dominan dengan keluhan dan citra petahana yang berjarak. Pernyataan ini sejalan dengan pengakuan dari tim koalisi yakni Mastilizal Aye dari Partai Gerindra yang menegaskan .

“Promosinya kurang karena itu tidak disampaikan tidak sampai ke masyarakat, saat jadi wali kota justru berkurang sosialisasinya.

Temuan ini menunjukkan bahwa petahana melakukan kesalahan strategi yang fatal dengan menganggap popularitas yang dimiliki sudah cukup. Petahana mengurangi sosialisasi justru pada saat ia harusnya gencar menginformasikan keberhasilan programnya. Kondisi ini membuat rekam jejak negatif diperkuat dengan kegagalan komunikasi yang pada akhirnya mendorong pemilih mencari sosok yang aktif dan berinteraksi yakni penantang sebagai wujud dari gelombang perubahan. Kedua pernyataan ini memperlihatkan bahwa kegagalan membangun narasi keberhasilan telah mempercepat proses kejenuhan sosial terhadap petahana.

Kejenuhan ini juga diperparah oleh beberapa kebijakan yang menimbulkan kesan negatif di tingkat bawah. Salah satu peristiwa yang sering disebut oleh masyarakat terkait relokasi pedagang Pasar Raya Padang Fase VII . kebijakan tersebut dianggap tidak komunikatif dan merugikan pedagang kecil. Seorang pedagang mengungkapkan bahwa mereka dipindahkan secara tiba-tiba tanpa waktu persiapan. Peristiwa ini menjadi simbol ketidakhadiran empati politik dari petahana dan memperkuat persepsi publik bahwa pemerintah kehilangan kepedulian terhadap masyarakat kecil. Dalam kerangka teori Sinclair, kejadian seperti ini merupakan bentuk dari erosi legitimasi simbolik karena pemimpin kehilangan makna moral dan kedekatan sosial yang menjadi fondasi kepercayaannya.

Barbara Sinclair menyebut fenomena ini sebagai bentuk *fatigue legitimacy* yaitu penurunan daya tarik simbolik akibat keletihan publik terhadap gaya dan figur yang sama. Dalam situasi seperti ini, publik tidak lagi merespon data atau program, melainkan mencari figur baru yang dapat menghadirkan semangat dan makna baru dalam kepemimpinan. Sinclair menegaskan bahwa dalam konteks politik elektoral modern, seperti kehadiran sosial dan pembaruan citra menjadi kunci mempertahankan legitimasi. Ketika pemimpin gagal melakukan keduanya, publik secara perlahan akan berpaling.

Fenomena kejenuhan publik terhadap Hendri Septa menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak disertai pembaruan simbolik akan kehilangan daya politiknya. Masyarakat Kota Padang pada Pilkada 2024 tidak menghukum karena kebijakan yang salah, tetapi karena rasa bosan yang tumbuh dari hilangnya kedekatan dan komunikasi sosial. Dalam konteks teori Sinclair, ini adalah fase awal kerugian petahana keunggulan yang dulu menguatkan justru berubah menjadi beban politik yang mempercepat kekalahan.

Akumulasi Kekecewaan Publik Terhadap Kebijakan Petahana

Ini adalah sebuah proses di mana berbagai kekecewaan, baik yang berskala besar maupun kecil, menumpuk dari waktu ke waktu. Satu kegagalan mungkin dapat dimaafkan, tetapi tumpukan dari berbagai kegagalan menciptakan beban negatif yang terlalu berat bagi petahana. Kejenuhan publik yang telah terbentuk selama masa jabatan Hendri Septa semakin diperkuat oleh akumulasi rasa kecewa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah kota yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Kekecewaan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui serangkaian pengalaman negatif, kesenjangan persepsi terhadap manfaat kebijakan, serta lemahnya komunikasi politik pemerintah. Dalam pandangan Barbara Sinclair, ketika seseorang pemimpin gagal mengelola persepsi publik terhadap kebijakan yang dijalankannya, maka yang muncul sekedar kritik terhadap hasil kerja, melainkan penolakan terhadap simbol kepemimpinan itu sendiri.

Salah satu sumber utama kekecewaan publik adalah kebijakan relokasi pedagang Pasar Raya Padang Fase VII. Dalam proses tersebut, sejumlah pedagang merasa bahwa pemerintah tidak memberikan sosialisasi yang memadai dan tidak menyiapkan tempat yang layak untuk berjualan. Sinclair menekankan bahwa dalam politik lokal, legitimasi tidak hanya dibangun melalui keberhasilan kebijakan, tetapi juga melalui rasa dihargai dan dilibatkan dalam keputusan. Ketika kebijakan berjalan tanpa komunikasi dan empati, masyarakat menilai bahwa pemerintah tidak lagi mewakili mereka. Hendri Septa selaku petahana menyatakan bahwa niat pemerintah pada relokasi adalah untuk menertibkan dan memperbaiki fasilitas pasar, namun mengakui bahwa sosialisasi dan persiapan lapangan belum optimal, sehingga efek pelaksanaan tidak diterima baik oleh sebagian pedagang.

“Kami memang berniat memperbaiki dan menata, tetapi promosinya kurang sehingga publik tidak tahu detail program yang sudah jalan”.

Temuan ini menjadi bukti kuat bahwa kekalahan petahana bukan disebabkan bukan kegagalan kinerja, melainkan kegagalan manajemen persepsi. Kebijakan tersebut

menjadi isu simbolik yang meluas. Dalam beberapa wawancara dengan masyarakat menyebut bahwa bukti pemimpin tidak peduli yang dinyatakan oleh Teti selaku masyarakat pemilih Kecamatan Nanggalo.

“Kalo orang kecil merasa tidak diperhatikan apalagi yang di pasar.

Makanya banyak orang kecewa.

Pernyataan ini menggambarkan bagaimana satu kebijakan yang tidak populer dapat menjadi simbol hilangnya kepedulian. Sinclair menyebut kondisi seperti ini sebagai *policy backlash*, di mana kebijakan yang gagal membangun resonansi publik justru menciptakan arus balik negatif terhadap figur pemimpin. Selain kebijakan pasar, isu lain yang menimbulkan ketidakpuasan adalah tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Padang yang mencapai 9,88 persen pada tahun 2024. Data ini menjadi bahan diskusi yang muncul dalam berbagai percakapan masyarakat. Beberapa informan menilai bahwa meskipun PAD meningkat, lapangan pekerjaan belum terasa terbuka. Salah satu masyarakat pemilih kecamatan Nanggalo yakni Dayat menuturkan.

“Kalau ekonomi katanya bagus, tapi cari kerja tetap susah, jadi kami kurang tahu bagusnya di mana.

Temuan ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara data ekonomi makro yang diklaim pemerintah dengan pengalaman ekonomi mikro yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam konteks teori Sinclair, ketika kebijakan ekonomi tidak mampu menciptakan efek psikologis positif di masyarakat, maka keberhasilan administratif tidak lagi punya nilai politis. Publik tidak menilai dari angka statistik, tetapi dari rasa yang mereka alami.

Kinerja ekonomi yang tidak dirasakan juga membuat masyarakat menilai bahwa program bantuan sosial yang dijalankan tidak merata. Salah satu informan masyarakat Kecamatan Nanggalo menyebut bahwa calon lain, Fadly Amran, dianggap lebih dekat dengan masyarakat karena aktif menyalurkan bantuan secara langsung yakni Teti, masyarakat pemilih Kecamatan Nanggalo menegaskan.

“Kalau Fadly itu ada bantuannya, ada yang nyata. Kalau Hendri Septa kami kurang tahu apa bantuannya.

Di sini terlihat jelas bahwa publik mengukur kinerja bukan hanya dari angka-angka makro melainkan dari bentuk perhatian langsung yang mereka terima. Sinclair menjelaskan bahwa di tengah kejenuhan gaya lama, pemilih akan cenderung merespon figur baru yang mampu menunjukkan kedekatan langsung dengan masalah mereka. Dari sisi komunikasi kekecewaan juga muncul karena petahana dinilai kurang mampu menyampaikan hasil kerja pemerintah kepada masyarakat secara efektif. Rayhan dari

PAN mengakui. “Program banyak yang bagus, tapi memang kami kurang publikasi. Masyarakat tidak tahu apa yang sudah dilakukan”.

Temuan ini adalah pengakuan kritis dari internal petahana bahwa kegagalan elektoral utama terletak pada kelemahan komunikasi politik yang menyebabkan program yang berhasil selama masa jabatan Hendri Septa menjadi tidak terlihat dan tidak diakui oleh publik. Sejalan dengan tim koalisi dari tim petahana yakni Mastilizal Aye dari Gerindra menambahkan. “Kinerja itu harus diceritakan, bukan cuma dijalankan. Kalau gak disampaikan, masyarakat pikir tidak ada kerja.”. Temuan ini menganalisis kritis terhadap kesalahan petahana. Petahana gagal memahami bahwa di era informasi, pemimpin harus menjadi penjual sekaligus pelaksana. Petahana terlalu fokus pada aspek dijalankan dan mengabaikan aspek diceritakan. Kegagalan ini memungkinkan penantang untuk mengisi kekosongan narasi dengan janji dan aktivitas yang lebih terlihat dan terdengar oleh masyarakat. Kedua pengakuan ini memperlihatkan bahwa kegagalan dalam membangun komunikasi publik telah menutup ruang bagi masyarakat untuk memahami manfaat kebijakan yang sebenarnya sudah berjalan. Kondisi tersebut diperkuat oleh penilaian pakar politik Asrinaldi, yang menilai bahwa kinerja administratif petahana memang baik, tetapi tidak memiliki efek elektoral karena tidak dikonversi menjadi narasi publik.

“Indikator makro seperti PAD atau IPM memang naik, tapi kalau masyarakat tidak merasa kehidupannya lebih baik, ya tidak ada gunanya. Orang menilai bukan dari data, tapi dari apa yang dirasakan.”

Sinclair menjelaskan fenomena ini sebagai *erosion of symbolic legitimacy* yakni legitimasi yang perlahan hilang karena capaian pemerintah gagal diterjemahkan menjadi pengalaman sosial yang bermakna. Dari berbagai pernyataan tersebut terlihat bahwa kekecewaan publik terhadap Hendri Septa tidak hanya berkaitan dengan kebijakan yang dijalankan, tetapi juga dengan cara kebijakan itu diartikulasikan dan dikomunikasikan. Relokasi pedagang yang tidak empatik, pengangguran yang tinggi, minimnya publikasi hasil kerja, serta ketimpangan persepsi terhadap bantuan sosial membentuk akumulasi narasi negatif yang menumpuk di tengah masyarakat. Sinclair menyebut proses ini sebagai akumulasi beban simbolik, yaitu saat seluruh ketidakpuasan kecil bertemu dan menciptakan persepsi kolektif bahwa pemimpin sudah tidak mampu menghadirkan perubahan.

Dengan demikian, akumulasi kekecewaan publik terhadap kebijakan Hendri Septa memperkuat posisi teoritis Sinclair tentang kerugian petahana. Dalam politik lokal, kekalahan bukan hanya hasil dari kegagalan ekonomi atau administratif,

melainkan hasil dari kehilangan makna simbolik kekuasaan ketika rakyat berhenti merasa diwakili oleh pemimpinnya. Dan ketika makna itu hilang, data dan prestasi administratif kehilangan daya politiknya.

Melemahnya Komunikasi Politik Dan Narasi Kepemimpinan

Ini merujuk pada kegagalan petahana dan timnya dalam dua hal yaitu: mengkomunikasikan atau menjual capaian-capaian kinerjanya kepada publik secara efektif dan membangun sebuah cerita atau narasi besar yang koheren tentang visi dan makna kepemimpinannya. Salah satu faktor paling menentukan dalam kekalahan petahana Hendri Septa pada Pilkada Kota Padang tahun 2024 adalah lemahnya komunikasi politik dan kegagalan dalam membangun narasi kepemimpinan yang kuat di mata publik. Dalam politik modern, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari capaian administratif, tetapi juga dari kemampuannya membingkai kinerja menjadi kisah yang hidup di benak masyarakat. Barbara Sinclair menjelaskan bahwa dalam struktur politik kontemporer, komunikasi publik berperan sebagai infrastruktur simbolik kekuasaan yaitu ketika narasi pemimpin berhenti menginspirasi, maka kekuasaan kehilangan daya legitimasi. Rayhan, Sekretaris DPD PAN Kota Padang, secara jujur mengakui kelemahan tim petahana dalam aspek publikasi. Ia menyatakan

“Kita juga akui bahwa Hendri Septa kurang publikasi. Banyak program bagus, tapi tidak sampai ke masyarakat. Padahal kalau disampaikan bisa jadi nilai positif.”

Temuan ini dapat disimpulkan bahwa kegagalan petahana terletak pada kegagalan mentransformasikan kerja nyata menjadi dukungan politik. Petahana memiliki program yang bagus tetapi kalah karena distribusi dan promosi yang buruk. Kegagalan ini menjadi faktor kunci yang memungkinkan penantang memenangkan hati pemilih melalui narasi perubahan yang lebih aktif dan vokal. Pernyataan senada datang dari Mastilzal Aye, perwakilan koalisi Gerindra.

“Promosinya itu kurang, program disampaikan tidak sampai. Waktu jadi wakil malah lebih aktif, tapi setelah naik jadi wali kota malah berkurang sosialisasi.”

Temuan ini menunjukkan bahwa petahana gagal beradaptasi dengan tuntutan perannya sebagai Walikota di era politik modern. Ia mengurangi sosialisasi justru pada saat ia harusnya gencar menginformasikan keberhasilan programnya. Kegagalan ini tidak hanya merusak rekam jejak negatif karena kinerja tidak terlihat, tetapi juga memicu kekalahan pemilih yang merasa diabaikan setelah petahana mendapatkan jabatan. Kedua pengakuan dari pihak internal ini memperlihatkan bahwa masalah utama bukan terletak

pada substansi kebijakan, melainkan distribusi informasi dan narasi publik yang tidak berjalan. Argumen Hendri Septa sendiri mengakui adanya gap antara capaian administratif dan persepsi publik. “kami memang bekerja dan ada capaian, tapi itu kurang tersosialisasi ke publik. Temuan ini menegaskan bahwa konfirmasi akhir dari kegagalan komunikasi politik petahana, di mana keberhasilan kerja dan capaian tidak diakui dan tidak tercatat dalam memori pemilih karena menimnya eksposur publik.

Dalam konteks teori Sinclair, lemahnya komunikasi politik semacam ini termasuk dalam kategori *narrative breakdown*, yakni kegagalan seorang pemimpin mempertahankan cerita politiknya di ruang publik. Sinclair menjelaskan bahwa seorang pemimpin perlu secara terus-menerus membangun cerita diri yang menghubungkan antara tindakan, capaian, dan aspirasi publik. Ketika narasi tersebut tidak diperbarui atau tidak dikomunikasikan dengan baik, publik kehilangan konteks untuk memahami capaian pemimpinnya. Akibatnya, keberhasilan administratif tidak lagi memiliki makna simbolik. Fenomena ini kontras dengan strategi komunikasi Fadly Amran yang dinilai jauh lebih aktif dan adaptif terhadap pola komunikasi publik modern. Mai, salah satu masyarakat pemilih, menuturkan.

“Fadly sering posting kegiatan, bantu orang, atau ikut acara masyarakat. Jadi kami merasa dekat walaupun tidak kenal langsung.”

Keaktifan tersebut menjadi bentuk komunikasi simbolik yang kuat Fadly Amran berhasil membangun kesan kedekatan sosial meskipun secara struktural ia bukan petahana di Kota Padang. Sinclair menjelaskan bahwa pemimpin yang mampu memanfaatkan media sebagai sarana simbolik akan mendapatkan keunggulan elektoral yang signifikan, karena publik cenderung menilai dari kehadiran visual dan emosional, bukan semata dari laporan kinerja. Kelemahan komunikasi publik Hendri Septa juga diakui oleh pakar politik Asrinaldi, yang menilai bahwa petahana gagal mengemas keberhasilan menjadi narasi publik yang kuat. Menurutnya.

“Hendri itu bekerja, tapi tidak bisa mengkomunikasikan kerja itu. Di era sekarang, kerja tanpa cerita sama dengan tidak dianggap.”

Pernyataan ini sejalan dengan kerangka teori Sinclair bahwa komunikasi bukan sekadar pelengkap kebijakan, tetapi fondasi simbolik yang menjaga kesinambungan legitimasi kekuasaan. Tanpa komunikasi yang efektif, keberhasilan pemerintahan berhenti di ruang birokrasi tanpa pernah mencapai ruang sosial. Secara keseluruhan, lemahnya komunikasi politik Hendri Septa menciptakan efek berantai: publik kehilangan informasi, relawan kehilangan semangat, dan lawan politik berhasil mengisi ruang kosong narasi. Sinclair menyebut situasi ini sebagai *symbolic vacuum*, yaitu

kekosongan makna yang muncul ketika pemimpin gagal memproduksi wacana tentang dirinya sendiri. Dalam kekosongan itu, publik akan mencari figur baru yang dapat menawarkan cerita yang lebih hidup, segar, dan relevan. Maka, kekalahan Hendri Septa bukan hanya akibat dari kegagalan administratif, melainkan kegagalan simbolik kekalahan dalam merebut makna.

Dinamika Perbandingan Figur dan Citra Kandidat

Ini adalah proses di mana pemilih secara aktif membandingkan atribut, gaya dan citra personal petahana dengan penantang. Ketika pemilih sudah jenuh mereka mencari figur penantang yang menawarkan citra kontras. Karena pemilih lelah dan tidak puas dengan rekam jejak petahana, mereka termotivasi untuk mencari yang baru. Proses pencarian inilah yang disebut dinamika perbandingan figur, yang merupakan motor penggerak perubahan. Kekalahan petahana Hendri Septa dalam Pilkada Kota Padang 2024 tidak hanya mencerminkan kegagalan mempertahankan legitimasi, tetapi juga menunjukkan keberhasilan penantang, Fadly Amran, dalam membangun figur politik yang kuat dan relevan dengan aspirasi publik.

Dalam pandangan Barbara Sinclair, kompetisi elektoral tidak semata tentang adu kebijakan, melainkan tentang pertarungan simbol dan narasi kepemimpinan. Seorang petahana bisa kalah bukan karena programnya buruk, tetapi karena figur baru berhasil merebut makna sosial yang dulunya melekat pada dirinya. Masyarakat Kota Padang melihat Fadly Amran sebagai sosok muda, enerjik, dan dekat dengan masyarakat. Salah satu masyarakat pemilih Kecamatan Nanggalo, Mai mengungkapkan.

“Ibuk pilih Fadly karena dia pernah jadi wali kota juga di Padang Panjang.

Orangnya ramah, suka datang ke acara warga, dan peduli sama masyarakat.

Temuan wawancara ini menunjukkan bahwa citra kepemimpinan yang dibangun oleh Fadly Amran bersandar pada gaya komunikasi yang egaliter dan empatik. Ia dikenal sering menghadiri kegiatan sosial dan keagamaan di berbagai wilayah Kota Padang. Temuan tersebut didukung dengan salah satu masyarakat pemilih Kecamatan Nanggalo, Teti, menuturkan.

“Kalau FA (Fadly Amran) itu rajin sekali datang ke acara masyarakat.

Kadang ada nikahan, pengajian, atau kegiatan pemuda, dia datang. Jadi orang merasa dekat.”

Temuan ini menunjukkan fenomena ini menggambarkan bahwa Fadly berhasil mengisi kekosongan simbolik yang ditinggalkan Hendri Septa ia hadir sebagai pemimpin yang terlihat dan terasa. Sinclair menyebut kondisi ini sebagai

symbolic substitution, ketika publik menggantikan figur lama dengan figur baru yang dianggap lebih representatif terhadap nilai-nilai sosial mereka.

Perbandingan figur juga mencakup aspek citra moral dan integritas. Martha Suhendra, perwakilan Partai Nasdem, menjelaskan bahwa Fadly Amran memiliki reputasi positif dari pengalaman sebelumnya di Padang Panjang. Ia menyatakan.

“FA itu sudah terbukti bersih waktu jadi wali kota Padang Panjang. Tidak nepotisme, tidak banyak janji kosong. Branding-nya bersih, dan itu yang kami jual ke masyarakat Padang.”

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa kredibilitas masa lalu Fadly berperan besar dalam memperkuat citra kepemimpinan barunya di Padang. Sementara itu, citra Hendri Septa justru melemah karena publik menilai kepemimpinannya tidak membawa pembaruan signifikan. Kredibilitas sebagai alternatif juga dipertegas oleh pandangan pakar politik Asrinaldi. Menurutnya.

“Kekalahan Hendri bukan karena tidak bekerja, tapi karena lawannya punya rekam jejak yang lebih menarik dan punya kemampuan menjual diri lebih baik ke publik.”

Dalam konteks teori Sinclair, hal ini menggambarkan proses *symbolic realignment* yaitu ketika publik mengalihkan dukungan kepada figur baru yang dianggap membawa semangat, nilai, dan simbol politik yang lebih relevan dengan kondisi sosial yang mereka alami. Selain faktor citra personal, strategi komunikasi kedua kandidat juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik. Hendri Septa dinilai kurang aktif membangun kedekatan digital dengan masyarakat, sementara Fadly Amran memanfaatkan media sosial secara efektif. Mai, masyarakat pemilih Kecamatan Nanggalo, menegaskan.

“Fadly aktif banget di Instagram, tiap kegiatan dia posting. Jadi kami tahu dia kerja. Kalau Hendri jarang kelihatan, bahkan akun resminya sepi.”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan digital Fadly membentuk *image of accessibility*, yaitu kesan bahwa pemimpin mudah dijangkau, responsif, dan hadir di ruang publik warga. Sinclair menegaskan bahwa dalam era politik visual, kehadiran digital memiliki nilai simbolik yang sama kuatnya dengan tatap muka langsung.

Kemenangan Fadly Amran menunjukkan bahwa keberhasilan elektoral di tingkat lokal sangat bergantung pada kemampuan figur untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial masyarakat ke dalam simbol kepemimpinan yang hidup. Sementara Hendri Septa berpegang pada data dan capaian administratif, Fadly menghadirkan *kisah yang*

dirasakan. Sinclair menulis, Pemimpin yang kehilangan narasi kehilangan kekuasaan, karena rakyat memilih bukan hanya siapa yang bekerja, tapi siapa yang mereka rasakan hadir dalam kehidupan mereka.” Kekalahan Hendri Septa menjadi bukti konkret bagaimana petahana dapat kalah bukan karena gagal membangun kota, tetapi karena gagal mempertahankan makna simbolik dirinya di mata rakyat.

Akumulasi Kerugian Simbolik Petahana Dan Hilangnya Legitimasi Politik

Ini adalah kesimpulan akhir dari semua proses di atas. Kerugian simbolik berarti petahana tidak lagi dilihat sebagai simbol harapan, solusi, atau kemajuan, sebaliknya, ia telah menjadi simbol stagnasi, masalah atau kegagalan. Ketika ini terjadi, petahana kehilangan kepercayaan dan moral yang berujung pada hilangnya legitimasi politik di mata pemilih. Kekalahan Hendri Septa dalam Pilkada Kota Padang tahun 2024 menjadi bukti konkret bagaimana kekuasaan dapat kehilangan daya legitimasi bukan karena kegagalan administratif, tetapi karena keruntuhan makna simbolik di mata publik. Dalam teori Barbara Sinclair, kekuasaan politik memiliki dua lapisan: kekuasaan administratif dan kekuasaan simbolik. Selama masa jabatan, seorang petahana akan terus diuji bukan hanya pada sejauh mana ia memenuhi target pembangunan, tetapi juga sejauh mana ia mempertahankan makna sosial dari kepemimpinannya. Ketika makna itu pudar, segala bentuk keberhasilan administratif kehilangan daya politiknya.

Pada kasus Hendri Septa, semua indikator administratif menunjukkan capaian yang positif, mulai dari peningkatan PAD, penurunan angka kemiskinan, hingga penghargaan pembangunan daerah dari Bappenas. Namun di sisi lain, publik kehilangan rasa kedekatan terhadap figur Hendri Septa. Seorang masyarakat pemilih Kecamatan Nanggalo, Teti, menuturkan.

“Kami tidak ada merasakan perubahan oleh Hendri Septa ini, makanya kami bertukar ke pilihan yang lain.”

Temuan dari kalimat sederhana ini merepresentasikan apa yang disebut Sinclair sebagai *symbolic disconnection* yaitu situasi di mana publik berhenti merasa terhubung secara emosional dengan pemimpinnya. Di sisi lain, perbandingan dengan figur lawan memperparah persepsi publik terhadap petahana. Fadly Amran, dengan pendekatan sosialnya yang cair, menciptakan kesan bahwa ia lebih dekat dengan rakyat. Dayat, salah satu masyarakat pemilih Kecamatan Nanggalo, menyebut.

“Kalau Fadly itu terasa hadir, datang ke masyarakat, jadi orang merasa didengarkan sementara Hendri Septa dinilai lebih sering hadir melalui baliho dan acara formal.”

Temuan wawancara ini bentuk kontras yang mencolok dalam gaya kepemimpinan dan strategi komunikasi kedua kandidat yang menunjukkan kegagalan petahana dalam membangun kedekatan emosional dan kemenangan penantang dalam membangun citra kepada masyarakat. Sinclair menggambarkan fenomena ini sebagai *symbolic displacement* yaitu saat simbol kepemimpinan lama digantikan oleh simbol baru yang lebih relevan secara sosial dan emosional. Dalam konteks Pilkada Padang, Fadly Amran berhasil menjadi simbol pembaruan, sementara Hendri Septa terperangkap dalam citra lama yang statis.

Lemahnya komunikasi politik juga mempercepat hilangnya legitimasi simbolik petahana. Rayhan, dari DPD PAN Kota Padang, mengakui.

“Kami gak bisa menyampaikan kerja beliau secara maksimal. Banyak capaian bagus, tapi masyarakat gak tahu. Itu kelemahan kami.”

Temuan dari wawancara tersebut bentuk dari pengakuan sangat jujur dan refeltif dari tim internal petahana bahwa akar kekalahan mereka adalah kegagalan komunikasi politik karena kurang sosialisasi yang membuat capaian kerja bagus tidak diakui oleh publik. Hal ini sejalan dengan tim koalisi Mastilzal Aye dari Gerindra menambahkan.

“Hendri itu sebenarnya punya kerja bagus, tapi gak dijual. Akhirnya orang pikir dia tidak ada kerja”

Temuan wawancara ini menjelaskan bahwa kinerja petahana mengalami kegagalan dalam pemasaran politik yang menyebabkan capaian yang baik tidak diakui, sehingga membentuk rekam jejak negatif di publik. Kedua pengakuan ini memperlihatkan bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya dibangun dari apa yang dilakukan, tetapi dari bagaimana publik memahami apa yang dilakukan. Dalam konteks teori Sinclair, legitimasi politik tidak otomatis lahir dari prestasi, melainkan dari kemampuan memelihara *narasi simbolik* yang memperkuat hubungan emosional antara pemimpin dan rakyat. Pakar politik Asrinaldi menegaskan hal yang sama.

“Hendri itu punya kerja bagus, tapi kehilangan makna. Politik itu bukan cuma soal capaian, tapi soal rasa. Kalau masyarakat udah gak punya rasa percaya, sebaik apapun datanya, gak akan berarti.”

Pandangan ini memperkuat argumen Sinclair bahwa pada titik tertentu, kerugian simbolik lebih menentukan kekalahan daripada kegagalan kebijakan. Ia menyebut proses ini sebagai *erosion of symbolic legitimacy* yaitu hilangnya kekuatan moral dan emosional yang selama ini menopang stabilitas kekuasaan. Hilangnya legitimasi politik petahana akhirnya memuncak pada Pilkada 2024. Suara masyarakat berpindah bukan karena kemarahan spontan, melainkan karena akumulasi kekecewaan dan kejenuhan yang terus

menumpuk. Situasi ini menunjukkan bahwa krisis simbolik tidak hanya terjadi pada masyarakat, tetapi juga di tubuh pendukung internal petahana. Ketika kepercayaan hilang dari dalam, maka dukungan dari luar pun runtuh.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekalahan petahana Hendri Septa-Hidayat pada Pilkada Kota Padang 2024 merupakan manifestasi dari fenomena kerugian petahana yang dijelaskan dalam kerangka teori Barbara Sinclair. Teori ini relevan dalam menganalisis dinamika politik elektoral lokal di Indonesia, khususnya dalam konteks masyarakat yang menginginkan perubahan setelah satu periode kepemimpinan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kinerja administratif yang positif tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi dukungan elektoral. Hendri Septa tercatat memiliki sejumlah capaian, seperti peningkatan PAD, penurunan kemiskinan, pembangunan infrastruktur pendidikan, dan berbagai penghargaan daerah. Namun, capaian ini gagal dikomunikasikan secara efektif kepada publik, sehingga tidak membentuk persepsi positif di tingkat masyarakat. Hal ini diperparah dengan kejenuhan politik di kalangan pemilih yang menginginkan pembaruan kepemimpinan setelah lima tahun.

Faktor lain yang turut mempercepat kekalahan petahana adalah akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap beberapa kebijakan, seperti relokasi pedagang Pasar Raya Padang Fase VII yang dinilai tidak partisipatif, serta tingginya angka pengangguran yang tidak kunjung teratasi. Di sisi lain, ketidakefektifan strategi kampanye dan lemahnya koordinasi internal koalisi PAN-Gerindra memperlemah posisi petahana. Sementara itu, pasangan penantang, Fadly Amran-Maigus Nasir, berhasil membangun citra sebagai figur yang lebih dekat dengan masyarakat, aktif berkomunikasi, dan menawarkan narasi perubahan yang lebih segar. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa asumsi awal tentang kerugian petahana terbukti valid dalam konteks Pilkada Kota Padang 2024. Posisi petahana justru menjadi beban ketika tidak diimbangi dengan kemampuan membangun narasi politik yang relevan, menjaga kedekatan emosional dengan pemilih, dan merespons secara cepat dinamika ketidakpuasan publik.

Daftar Pustaka

Adi, T. 2024. *KPU Padang Tetapkan Fadly Amran-Maigus Nasir Pemenang Pilwalkot Padang 2024 - Celah Sumbar*. Celah Sumbar. diakses

- <https://sumbar.pikiran-rakyat.com/politik/pr-3158851523/kpu-padang-tetapkan-fadly-amran-maigus-nasir-pemenang-pilwalkot-padang-2024>.
- Adril, MY. 2023. Infosumbar. *Walikota Padang Hendri Septa Terima Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2022 dari Ombudsman RI*.
- <https://infosumbar.net/berita/berita-sumbar/padang/wali-kota-padang-hendri-septa-terima-penghargaan-predikat-kepatuhan-standar-pelayanan-publik-tahun-2022-dari-ombudsman-ri/>
- Afrizal.2014.*Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Analisisini.id. 2023. Berkinerja Terbaik, Wako Hendri Septa Raih Penghargaan SPM Award 2023. <https://www.analiskini.id/2023/03/berkinerja-terbaik-wako-hendri-septa.html>.
- Fathan, H. P. 2023. *Faktor-Faktor Kekalahan Hendrajoni Pada Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020* (Skripsi, Universitas Andalas).
- Hanafi. 2024, 8 Desember. *Daftar Petahana Tumbang di Sumbar pada Pilkada 2024, Ada yang Hanya Dapat 20,91 Persen - Ayo Bandung*. diakses <https://www.ayobandung.com/umum/7914108466/daftar-petahana-tumbang-di-sumbar-pada-pilkada-2024-ada-yang-hanya-dapat-2091-persen>.
- Hendra, Efison.2024, 14 Agustus. *Mahyeldi Lebih Baik Dibanding Hendri Septa Saat Pimpin Padang - Padek Jawapos*. Mahyeldi Lebih Baik Dibanding Hendri Septa Saat Pimpin Padang - Padek Jawapos; Padek Jawapos. <https://padek.jawapos.com/padang/2364974314/mahyeldi-lebih-baik-dibanding-hendri-septa-saat-pimpin-padang>.
- Habil, Ramanda.2024, 26 April. *Terima Rekomendasi PAN, Hendri Septa Nyatakan Kembali Maju Pemilihan Wali Kota Padang 2024 - Sumbarkita.id*. Sumbarkita.id. <https://sumbarkita.id/terima-rekomendasi-pan-hendri-septa-nyatakan-kembali-maju-pemilihan-wali-kota-padang-2024/>.
- Imel.2024. Binews.id. <https://binews.id/berita/18048/hendri-septa--hidayat-punya-peluang-lebih-besar.html>
- Iqbal, M. 2022, 25 Januari 'Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November'. *CNBC Indonesia*. <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220125134125-4-310262/catat-pemilu-2024-digelar-14-februari-pilkada-27-november>

- Jailani, Ardiansyah, dan Risnita. 2023. *Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. IHSAN: *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2); 1-9
- Kurniati, R. 2024, 4 September. *Profil Hidayat, Eks Legislator Sumbar Bakal Calon Wakil Wali Kota Padang*. *Tribunpadang.com*.
<https://padang.tribunnews.com/2024/09/04/profil-hidayat-eks-legislator-sumbar-bakal-calon-wakil-wali-kota-padang>.
- Marijan, K. 2019. *Sistem politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca orde baru. Kencana*.
- M.Rafi Ariansyah, et al.2024. Faktor-Faktor Kekalahan Petahana dalam Kontestasi Pilkada 2024 di Kota Padang *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*. Hlm105.
- Moleong, Lexy.2012.*Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed Tjun Surjaman, (Bandung: PT Remaja Rosardajarya.
- Nasiruddin, N., Mausili, D. R., & Nuraliah, D. 2022. *Strategi incumbent dalam pemenangan pemilihan legilslatif*. *Jurnal Arajang*, 5(2), 193-202.
- Padang.go.id. 2022. Walikota Padang Menerima Penghargaan Smart City Kategori Smart Society dari Menteri Komunikasi dan Informatika.
<https://padang.go.id/wali-kota-padang-menerima-penghargaan-smart-city-kategori-smart-society-dari-menteri-komunikasi-dan-informatika>.
- Ramadhan, Gilang. 2020. *Pilkada Bekasi Dalam Dilema Patron Klien : Antara Sosiologi Politik Dan Pemilih Rasional*. *JSPG : Journal Of Social Politics and Governance*. Vol 2 No. 1 Juni 2020, mengutip : Maxwell, A. (2011). *Unlocking VO Key Jr.:" Southern Politics" for the Twenty-First Century*. University of Arkansas Press.
- Rozali, J. 2017. *Studi Komparasi Emik Dan Etik Masyarakat Terhadap Menjamurnya Tayangan Drama Asing Di Indonesia: Kajian Antropologi Kontemporer*
- Robert, K. Yin. 2003.*Studi Kasus (Desain dan Metode)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
- Riadi, M. G. F.2021.*Koalisi Dan Modalitas (Analisis Kekalahan Pradi Supriatnaafifah Alia Dalam Pilkada Kota Depok 2020)* (Skripsi, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sinclair, Barbara. *Legislators, Leaders, and Lawmaking: The U.S. House of Representatives in the Postreform Era* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995),

- Savira, Diktavioni. 2023. Scribd.com. "Metodologi Penelitian H.B Sutopo," <https://id.scribd.com/document/636138364/metodologi-penelitian-h-b-sutopo>.
- SigapNewsSumbar. 2021. Kota Padang Raih Penghargaan Terbaik II Perencanaan Pembangunan Kota se-Indonesia. <https://sumbar.sigapnews.co.id/padang/sn-27387/kota-padang-raih-penghargaan-terbaik-ii-perencanaan-pembangunan-kota-se-indonesia>.
- Sinyalgonews.com.2024. Hasil Kerja Hendri Septa Selama Memimpin Kota Padang(2019-2024).<https://sinyalgonews.com/hasil-kerja-hendri-septa-selama-memimpin-kota-padang-2019-2024/>.
- Sumbarsatu.com. 2024. Ini Bukti Konkret Kerja Nyata Hendri Septa Semasa Wali Kota Padang.<https://sumbarsatu.com/berita/32082-ini-bukti-konkret-kerja-nyata-hendri-septa-semasa-wali-kota-padang>.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan. Doddy. Eka Setyorini. 2018. Dampak pemilihan kepala daerah terhadap alokasi belanja daerah. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*. 2 (2).
- Stiers, Dieter.2022. *Performance voting, retrospective voting and economic voting. Concetual clarity and empiritical testing. Social scinve Quarterly*, 103(2), 399-408.
- Tika, A. L. 2019. *Analisis Faktor-Faktor Kekalahan Pasangan Petahana (Ali Yusuf-Ismed) Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Sawahlunto Tahun 2018* (Skripsi, Universitas Andalas).
- Tjenreng, M. B. Z. 2020. *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*. Penerbit Papas Sinar Sinanti.
- Tempo.com. 2024. Padang Bagoro, Memulai Bersih dari Keluarga. <https://www.tempo.co/info-tempo/padang-bagoro-memulai-bersih-dari-keluarga-27360>.
- Wijaya, Hengky. 2018. Analisis Data Kualitatif Model Spradley .<https://api.core.ac.uk/oai/oai:repository.sttjaffray.ac.id:26901>